

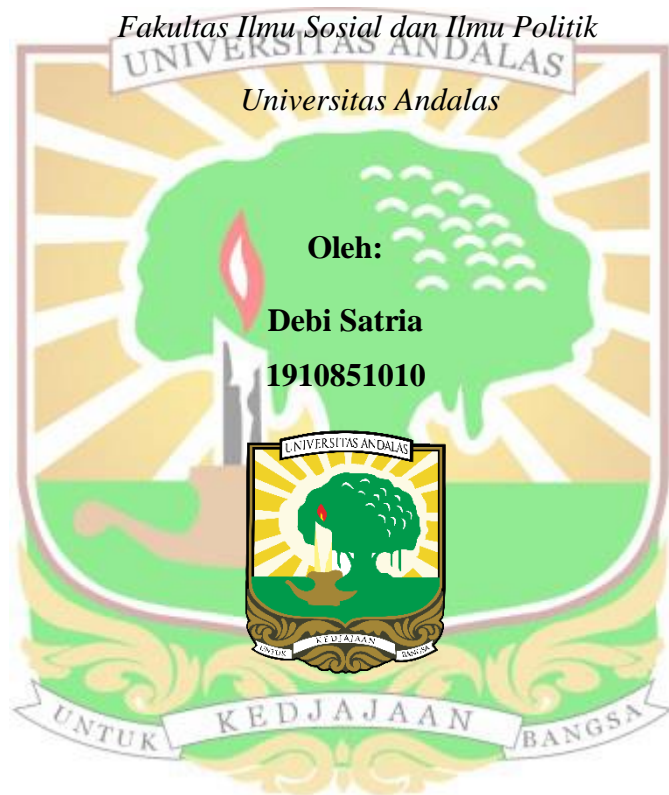
**RESPON JEPANG TERHADAP TUNTUTAN KOMPENSASI
KERJA PAKSA OLEH MAHKAMAH AGUNG KOREA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS ANDALAS
Universitas Andalas*



Pembimbing I: Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.SI

Pembimbing II: Silvi Cory, M.SI

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2024

ABSTRAK

Jepang menerapkan restriksi ekspor kepada Korea Selatan sebagai respon dari tuntutan yang diberikan oleh Korea Selatan atas korban kerja paksa Perang Dunia II. Namun hal ini menyebabkan konflik antara kedua negara terutama Jepang yang telah melanggar *non-tariff measures* dalam perjanjian *Japan Korean Free Trade Agreement*. Meskipun Jepang telah terikat perjanjian kerjasama namun Jepang tetap melakukan restriksi ekspor kepada Korea Selatan. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan apa hal yang mempengaruhi respon Jepang dalam menanggapi tuntutan yang diberikan oleh Korea Selatan terkait kerja paksa. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan apa hal yang mempengaruhi respon Jepang dalam menanggapi tuntutan yang diberikan oleh Korea Selatan terkait kerja paksa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Penelitian ini menggunakan konsep *disproportionality* yang ditulis oleh Kayce Marie Mobley. Penelitian ini menggunakan pendekatan *dyadic explanation* menjelaskan bahwa respon disproportional terjadi dikarenakan hubungan antara kedua negara. Peneliti menemukan bahwa adanya permasalahan terhadap isu sejarah seperti isu *comfort women*, isu pulau Takeshima/Dokdo, dan isu korban kerja paksa yang masih belum terselesaikan. Selanjutnya mengenai permasalahan terkait kerjasama antara kedua negara yaitu restriksi yang dilakukan sebagai bentuk protes akan tuntutan Korea Selatan. Terakhir permasalahan keamanan nasional dengan adanya kecurigaan Jepang terhadap Korea Selatan atas penyalahgunaan bahan kimia untuk penggunaan militer di Korea Utara.

Kata kunci: Restriksi Ekspor, Disproportionality, Respon, Jepang, Korea Selatan



ABSTRACT

Japan implemented export restrictions on South Korea in response to South Korea's demands regarding forced labor victims from World War II. This led to conflict between the two countries, especially since Japan violated non-tariff measures within the Japan-Korea Free Trade Agreement. Despite being bound by a cooperation agreement, Japan continued to impose export restrictions on South Korea. This raises the question of what factors influenced Japan's response to South Korea's demands concerning forced labor. The purpose of this research is to explain the factors that influenced Japan's response to South Korea's demands related to forced labor. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, collecting data through literature studies. The research employs the concept of disproportionality as written by Kayce Marie Mobley. It uses a dyadic explanation approach to explain that disproportional responses occur due to the relationship between the two countries. The researcher found that there are unresolved historical issues such as the comfort women issue, the Takeshima/Dokdo island issue, and the forced labor victims issue. Additionally, there are issues related to cooperation between the two countries, where the restrictions were imposed as a form of protest against South Korea's demands. Finally, there are national security concerns, with Japan suspecting South Korea of misusing chemicals for military purposes in North Korea.

Keyword: export restrictions, Dispropotionality, Response, Japan, South Korea

